

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum hubungan internasional berarti hubungan antar negara. Sekarang definisi ini mulai berubah karena perkembangan mutakhir tentang kondisi politik dunia menuntut untuk membuat pengertian hubungan internasional lebih luas. Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi negara-negara berdaulat di dunia, dan juga studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa (MNC, IGO, INGO, dan TOC, serta teroris internasional) (Perwita, & Yani, Y.M, 2006). Kemudian Studi Hubungan Internasional adalah ilmu yang membahas tentang hubungan-hubungan antar aktor, baik itu negara, non negara (seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional) bahkan individu di dalam sistem internasional. Studi Hubungan Internasional dalam hal ini, melihat pada segala jenis hubungan “harmoni ataupun konflik, damai ataupun perang, sipil ataupun militer, politis maupun ekonomis”. (Johari, 1985)

Sementara itu dalam berbagai literature ilmu Hubungan Internasional, Studi keamanan berkaitan langsung dengan ilmu Hubungan Internasional yang notabene adalah interaksi antar aktor internasional. Konsep keamanan merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu Negara untuk melindungi negaranya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal (*the absence of military threat or with the protection of the nation from external overthrow or attack*). (Haftendorn, 1991)

Sejalan dengan perkembangan-perkembangan yang begitu cepat dalam hubungan internasional, Barry Buzan memperluas makna konsep keamanan dengan argumentasi bahwa keamanan tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor Negara semata melainkan akan meliputi aspek-aspek non militer dan melibatkan pula aktivitas aktor non-negara (Buzan, 1997). Berdasarkan argumentasi Barry Buzan ini dapat dikatakan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam keamanan tidak lagi hanya difokuskan pada aktor Negara tetapi kini juga perlu memperhatikan peran aktor non-negara seperti organisasi kejahatan

transnasional, kelompok teroris. Bahkan kini kita menyaksikan mengemukanya aktor-aktor transnasional dan aktor non-negara yang memiliki kapasitas aksi secara global.

Mengkaji masalah yang berkaitan dengan politik, keamanan dan konflik di Timur Tengah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Hal ini dianggap menarik karena Timur Tengah merupakan wilayah yang dihuni oleh berbagai macam etnis, hal ini menjadikan wilayah tersebut rawan akan konflik etnis. Konflik etnis timbul ketika terjadi penguasaan wilayah dan penindasan oleh etnis mayoritas terhadap etnis minoritas, biasanya etnis yang tertindas tersebut tidak memiliki kesatuan yang mumpuni sebagai sebuah kelompok. Hal ini kemudian memunculkan gerakan perjuangan dari etnis yang tertindas dan minoritas untuk melawan penguasa agar eksistensi kelompok mereka tetap terjaga dengan baik. Salah satu Negara di Timur Tengah yang memiliki etnis beraneka ragam adalah Negara Turki.

Pada tahun 1923 Mustafa Kemal Pasha yang kemudian diberi gelar Atatürk atau “Bapak Turki” mulai membentuk Turki modern. Di bawah kepemimpinannya yang otoriter, Turki melakukan reformasi di bidang sosial, hukum, dan politik. Pada masa Mustafa Kemal Pasha Turki mengalami perubahan yang cukup signifikan, bahkan dengan revolusioner dari orde lama ke orde baru. Kemal dengan gerakan barunya memperlihatkan kecenderungan yang sangat berbeda. Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat (Zurcher E. J., 2003). Dari sinilah awal konflik dimulai antara Suku Kurdi dengan pemerintah Turki. Sejak tahun 1984 hingga saat ini, pemerintah Turki masih belum bisa mengatasi aksi kelompok militan suku Kurdi yang dikenal sebagai Partiya Kankerran Kurdistan (PKK) yang telah banyak memakan korban baik dari Turki sendiri maupun kaum Kurdi. PKK menginginkan perubahan terhadap nasib mereka kemudian menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima, baik hak secara etnis minoritas maupun dalam skala yang lebih luas yakni sebagai bangsa. Pemerintah Turki menganggap tuntutan tersebut sebagai ancaman terhadap wilayah kedaulatan negara dan harus segera ditindaklanjuti.

Penelitian tentang tindakan yang dilakukan oleh PKK di Turki ini memiliki banyak asumsi. Salah satunya adalah asumsi bahwa nasionalisme sipil lebih berbudi luhur dan liberal daripada nasionalisme etnis yang umumnya dianggap berbahaya dan eksklusif (Wolff, 2006). Banyak peneliti berpendapat bahwa nasionalisme Turki, yang dianggap

mempromosikan etnisitas Turki dengan mengorbankan kelompok etnis lain, hal ini mendorong dan meradikalisasi nasionalisme etnis Kurdi. Kemudian Michael Gunter mengklaim, "Nasionalisme Kurdi sebagian besar berkembang di abad ke-20 sebagai reaksi Suku Kurdi yang tidak memiliki wilayah terhadap nasionalisme resmi negara yang represif seperti yang terjadi di Turki, Irak, Iran, dan Suriah (Gunter, 1997). Berdasarkan asumsi tersebut, Suku Kurdi melalui PKK mencoba meningkatkan nasionalismenya yang kemudian dipandang sebagai upaya kudeta oleh Negara dimana suku Kurdi tersebut berdiam. Turki menganggap Kelompok PKK adalah kelompok teroris yang suatu waktu akan mengancam Negara Turki.

Sejak awal berdirinya Republik Turki, Negara ini telah menetapkan perdamaian sebagai pilar utama di negaranya. Prinsip "*Peace at Home and Peace Abroad*" (damai di rumah dan perdamaian di dunia internasional) ditetapkan oleh Mustafa Kemal Pasha sebagai pandangan baru bagi Negara ini. Turki melaksanakan kebijakan luar negeri yang merupakan generator keamanan dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya berdasarkan sekuler demokratis dan sistem politik, ekonomi hidup dan mendamaikan tradisi modernitas dengan identitas budaya. Konflik tersebut tidak hanya menjadi masalah di tingkat nasional tetapi juga di tingkat regional dan internasional.

Dampak yang ditimbulkan di tingkat regional adalah menegangnya hubungan antara Turki dan Irak akibat operasi militer lintas batas yang dilakukan Turki ke wilayah Irak bagian utara pada akhir tahun 2006 dan pada tanggal 17 Oktober 2007 disahkannya undang-undang yang mengizinkan angkatan bersenjata Turki untuk melakukan serangan lintas batas guna melumpuhkan serangkaian pemberontakan yang dilakukan oleh para kelompok militan suku kurdi atau Partiya Kankerran Kurdistan (PKK) (Ridolfo, 2006). Turki memiliki kepentingan besar terhadap kawasan Kurdi dan Irak Utara, tempat satu satunya pemerintahan otonomi berbentuk Negara kecil untuk Kurdi berada. Turki tidak akan membiarkan otonomi Turki di Irak semakin besar karena Turki tidak menginginkan Irak Utara sebagai batu loncatan separatisme Kurdi dalam pembentukan Negara Kurdistan.

Gerakan perlawanan suku Kurdi yaitu Partai Pekerja Kurdistan (PKK) didirikan oleh Abdullah Ocalan pada 27 Oktober 1978, Organisasi ini menganut ideologi Marxisme-Leninisme dan nasionalisme Kurdi serta bercita-cita mendirikan Negara Kurdi di wilayah

Turki bagian Tenggara. Sejak saat itu PKK mulai melancarkan serangan-serangan bersenjata terhadap target-target milik pemerintah Turki, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan terbentuknya PKK inilah, tuntutan kemerdekaan etnis Kurdi terhadap pemerintah Turki semakin mengemuka dan menguat, sehingga pada akhirnya mendorong tindakan yang kian represif dari pihak pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi. (Lenezowski, 1993)

Aktivitas-aktivitas PKK tidak terkendali dalam menteror para penjaga desa, merampas desa-desa, dan membantai penduduk sipil. Semua kegiatan ekonomi politik, kemiliteran, organisasi-organisasi sosial dan budaya yang ada menjadi medan perang. PKK juga telah berjanji akan menyalpkan parati-partai politik, institusi-institusi pendidikan dan kebudayaan imperialis, badan representatif dan legislatif, dan semua kerjasama daerah dan badan-badan yang bekerjasama dengan pemerintah pusat wilayah Kurdistan. (Zurcher E. J., 2003)

Bentrokan antara pasukan keamanan Turki dengan PKK telah memakan Korban yang tidak sedikit. Hingga tahun 1991 diperkirakan terdapat sekitar 3.568 korban jiwa, yang terdiri dari 1.278 warga sipil, 1444 militan PKK dan 846 pasukan keamanan Turki. Selain mempergunakan serangan-serangan yang bersifat konvensional, dalam kurun waktu 1996-1999 PKK menggunakan metode serangan bom bunuh diri (suicide bombing) (Kemal Kirişçi and Gareth M. Winrow, 1997). Konflik antara Kurdi dengan angkatan bersenjata Turki, dalam kurun waktu antara 1984 hingga 1996 korban tewas sudah mencapai 17.000 orang. Upaya pemerintah Turki dalam memutuskan pasokan dan rute infiltrasi PKK, pertempuran dilaksanakan secara regular hingga ke perbatasan Irak. Pesawat-pesawat Turki membordir kamp-kamp PKK di Irak Utara (Zurcher E. J., 2003). Kelompok gerilyawan Kurdi tercatat beberapa kali melakukan serangan bom di kota-kota wisata Aegean. Diantaranya, serangan bom di resor Cesme pada 11 Juli, di Pantai Aegean, yang melukai sedikitnya 20 orang, sedangkan tanggal 30 April sebuah bom juga meledak di sebuah alat pemutar kaset, menewaskan seorang polisi dan empat warga di Kusadasi. Gerilyawan Kurdi telah mengancam akan terus melakukan serangan di sector pariwisata Turki, yang sangat vital bagi perekonomian Turki (DetikNews, 2005)



Kelompok gerilyawan PKK ini juga mendapatkan dukungan dari suku Kurdi di negara-negara tetangga seperti di Irak, Iran dan Suriah selain memberikan bantuan kelengkapan pangan, pengungsian dan juga persenjataan bagi separatis PKK. Suku Kurdi di negara-negara tersebut memiliki keinginan yang sama yaitu ingin mendirikan sebuah negara Kurdistan yang otonom. Pada tahun 1990-an Damaskus pernah mendukung PKK dan menjamin ruang perlindungan bagi PKK di kawasan Suriah. Penyebabnya, pada waktu itu Turki menjalin hubungan baik dengan Israel. Pada masa-masa Perang Dingin, Israel dan Turki dipandang sebagai pro Barat, sementara Suriah cenderung berorientasi kepada kepentingan Uni Soviet. Bahkan Rusia maupun Iran bersimpati besar pada Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang sempat melakukan pemberontakan di Turki Tenggara melalui PKK, keduanya dapat menyerang Turki dan menjatuhkan posisi Turki dalam Uni-Eropa.

Presiden Turki pada tahun 2007, Abdullah Gul, dan Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama dengan sejumlah menteri dan pimpinan militer menggelar pertemuan pada tanggal 21 Oktober 2007 untuk membahas tindakan tegas yang akan ditempuh menyusul terjadinya insiden penyerangan oleh para gerilyawan PKK. Pada tanggal 15 Oktober 2007 pemerintah Turki juga telah mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan operasi militer Turki ke wilayah Kurdi yang terletak di bagian Utara Irak, yang dapat dilakukan kapan saja guna menghancurkan basis-basis PKK di wilayah tersebut. Pada tanggal 17 Oktober 2007, dengan suara bulat akhirnya parlemen Turki mengesahkan rancangan Undang-undang dan memberikan izin kepada angkatan bersenjata Turki untuk melakukan serangan lintas batas guna melumpuhkan basis-basis PKK di wilayah Irak Utara. Gerakan pemberontak Kurdi telah dianggap sebagai gerakan separatisme yang berbahaya bagi pemerintah Turki karena gerakan tersebut mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Turki. Pemberontakan Kurdi telah memasuki arena politik Turki dengan membentuk partai politik yang radikal dan mampu menghadapi tekanan Negara. (Barkey, 2011)

Namun seiring waktu, PKK yang sebelumnya dipandang sebagai sebuah gerakan separatisme saja, kemudian berkembang dan dianggap sebagai kelompok terorisme karena ideologinya dan aktivitas-aktivitas PKK yang berbahaya. AS menjelaskan dalam daftar organisasi terorisnya bahwa target utama dari PKK ini adalah pasukan keamanan

Pemerintah Turki di Turki. Melakukan serangan terhadap fasilitas diplomatik dan komersial Turki di puluhan Kota-kota Eropa Barat pada tahun 1993 dan juga pada musim semi 1995. Berupaya untuk merusak Industri pariwisata Turki, PKK membom lokasi wisata dan hotel dan menculik turis asing di awal hingga pertengahan 1990-an. Maka dari itu pada tahun 2000, AS dan Ankara sepakat untuk memasukkan PKK dalam daftar organisasi teroris internasional (US Department of State, 2001). Kemudian pada bulan Maret 2001, UK juga menetapkan bahwa PKK adalah organisasi teroris yang berada di Tenggara Turki dan memiliki tujuan untuk mendirikan sebuah Negara Kurdi (UK Government, 2013). Hal ini membuat PKK dan PYD adalah aktor internasional yang memberikan dampak dalam system internasional. Posisi PKK dan PYD bersama dengan ISIS dianggap sebagai organisasi teroris yang suatu waktu akan memberikan ancaman bagi Negara yang tidak sepaham dengan mereka.

Turki juga memasukkan PKK atau KCK (Kurdistan People Community, sayap militer PKK di Turki) dalam daftar organisasi teroris yang berpotensi memberikan ancaman dan ketakutan bagi warga Negara Turki. Hal ini dapat dilihat melalui situs resmi pertahanan Turki bahwa tujuan utama organisasi teroris PKK adalah untuk mendirikan sebuah Negara Kurdistan yang berbasis sosialisme, yang mencakup wilayah-wilayah dari empat negara (Iran, Irak, Suriah, dan Turki) tempat dimana suku Kurdi berdiam. Sebagai strategi fundamentalnya, PKK telah mengadopsi "Perang Publik Jangka Panjang" untuk mewujudkan tujuannya. (Ministry of Foreign Affairs Republic Turkey, 2008)

Ideologi organisasi teroris ini telah berkembang dari waktu ke waktu, sejak awal 1990-an, dengan jatuhnya Uni Soviet, ketika PKK mulai mengeksploitasi kebebasan dan konteks agama, terutama untuk menyediakan rekrutmen dan dukungan publik di wilayah tersebut. Saat ini, PKK mempertahankan ideologi separatisnya dengan pendekatan pragmatis sementara ia menggunakan ideologi Marxis / Leninis bersamaan dengan eksploitasi agama.

Lebih lanjut pada tahun 2011 meletus krisis dalam negeri Suriah, dimana krisis ini berawal dari demonstrasi pada Maret 2011 menuntut untuk diturunkannya rezim Bashar Al Assad yang telah berkuasa selama 5 dekade secara represif dan dianggap tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan Suriah (Muhammad, 2011),

kemudian pemerintahan Bashar Al Assad menanggapi kekacauan tersebut dengan menurunkan militer bersenjata guna membendung arus demonstrasi yang semakin membesar, yang dalam perkembangannya militer mulai menyerang para demonstran dengan tembakan secara brutal, sehingga para demonstran mulai merubah cara penuntutan mereka dari berdemonstrasi ke cara kekerasan bersenjata dan pada saat inilah terjadi perubahan dinamika dalam revolusi Suriah dari demonstrasi menjadi perang sipil.

Perang sipil di Suriah berawal dari skala kecil dimana yang menjadi medan pertempuran adalah sebagian kota-kota di Suriah dan dilakukan oleh masyarakat Suriah sendiri, kemudian berkembang menjadi skala yang lebih besar seiring dengan lamanya konflik tersebut berjalan dan semakin berkembang luasnya pengaruh para pemberontak yang mampu menguasai kota-kota dan fasilitas penting di Suriah, kekuatan para pemberontak semakin bertambah kuat ketika mendapat dukungan logistik, persenjataan bahkan pasukan dari pihak asing di luar Suriah dan konflik ini mulai disusupi oleh pihak-pihak asing yang berkepentingan di Suriah yang menyebabkan zona konflik semakin besar dan berimbas kepada Negara tetangga Suriah.

Secara global terjadinya konflik Suriah membuat negara-negara lain ikut terlibat. Salah satu keterlibatan pihak asing di konflik Suriah diakibatkan karena tindakan represif Bashar al-Assad kepada pihak oposisi. Tindakan represif yang dilakukan Assad antara lain penangkapan, tindakan kekerasan dan bahkan pembunuhan. Akibat dari tindakan represif tersebut semakin memicu pembentukan kelompok oposisi dan konflik ini meluas menjadi konflik agama. Selain itu konflik ini memunculkan peran *Free Syrian Army* (FSA), Partai Demokratik Kurdi (PYD), dan ISIS yang membuat negara-negara Barat seperti Turki, Rusia dan Amerika Serikat juga ikut terlibat. Faktor lain yang membuat Turki, Rusia dan Amerika Serikat ikut terlibat yaitu dengan adanya serangan senjata kimia yang telah menewaskan lebih dari 1.400 orang yang diantaranya warga sipil dan anak-anak. (Pujayanti, 2013)

Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Bashar al Assad mengecam kebijakan intervensi yang dilakukan oleh Turki dan Amerika Serikat ke negaranya. Bashar al Assad menyatakan bahwa "Masalah apapun di Suriah akan membakar seisi wilayah. kalau ada rencana untuk membelah Suriah berarti rencana itu akan memecah seisi wilayah". Ia juga

mengatakan bahwa konflik Suriah ini berpotensi menjadi Afghanistan lain, atau puluhan Afghanistan baru. Kecaman Bashar al Assad ini tidak membuat Turki dan Amerika Serikat gentar, karena tindakan kotor yang diambil oleh Assad dalam mempertahankan kekuasaannya. Banyak warga sipil yang menjadi korban dan tindakan militer Suriah yang tidak segan-segan untuk membantai rakyatnya sendiri. Pernyataan dari PBB juga mendesak agar Presiden Assad menanggapi tuntutan perubahan dengan reformasi serius, bukan dengan represi dan kekerasan serta menyerukan dihentikan segera seluruh operasi militer.

Turki dan Amerika Serikat memiliki tujuan untuk menurunkan Bashar al Assad dari kursi pemerintahan Suriah. Pihak Oposisi Suriah menginginkan adanya reformasi untuk meredakan konflik yang terjadi. Konflik Suriah juga semakin melebar dengan berkembangnya organisasi teroris seperti PKK dan PYD serta ISIS. Salah satu kepentingan Turki di Suriah yaitu untuk melawan organisasi teroris PKK dan PYD yang berada di Suriah. Oposisi Suriah mendukung rencana Turki untuk memberangus kelompok teroris PYD dan PKK ini. Abdurrahman Mustafa, wakil kepala Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi mengatakan bahwa kota-kota di perbatasan Suriah yang baru-baru ini berada di bawah kendali teroris PYD/PKK harus dibebaskan dari teroris sesegera mungkin. Dia menambahkan bahwa koalisi oposisi akan menawarkan bantuan kepada Turki untuk membebaskan Afrin dan wilayah lainnya yang berada di bawah kendali PYD/PKK.

Turki yang mejadi salah satu negara tetangga Suriah yang terkena dampak dari Konflik Suriah. Dampak Konflik Suriah terhadap Turki dalam bidang sosial misalnya, adalah terkait imigrasi masyarakat Suriah ke Turki guna mencari perlindungan, karena Turki merupakan negara terdekat Suriah yang dapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat bagi para pengungsi. Gubernur Propinsi Kilis, Turki, yang berbatasan dengan Suriah, mengatakan 35.000 pengungsi sudah mencapai wilayah perbatasan (BBC, 2016). Pada bidang politik dan keamanan Konflik Suriah membuat munculnya organisasi ISIS, dan organisasi kelompok militan Kurdi di Turki yang sejak lama menginginkan pendirian negara sendiri, yaitu Democratic Union Party (PYD).

Kelompok Kurdi utama Suriah, Partai Uni Demokratik atau Democratic Union Party (PYD), mulai mendirikan pondasi di utara pada awal perang ketika pasukan



pemerintah fokus pada upaya menghentikan pemberontakan anti-Assad di tempat lain. Sayap militer PYD, Unit Perlindungan Rakyat (YPG), mengamankan wilayah utara Suriah tempat suku Kurdi berdiam. Di awal konflik, kendali PYD terkonsentrasi di tiga wilayah yang didominasi orang Kurdi dan dihuni sekitar 2 juta orang Kurdi. Kelompok yang dipimpin Kurdi mulai membentuk struktur organisasinya pada saat krisis Suriah terjadi. Wilayah pengaruh YPG meluas ketika YPG bersekutu bersama AS melawan Negara Islam (IS). YPG berafiliasi bersama AS menjadi ujung tombak milisi multi-etnis bernama Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Pengaruh PYD-YPG atau SDF (PYD bersekutu dengan AS) melebar ke Manbij dan Raqqa karena IS dikalahkan di keduanya. Kemudian melebar semakin jauh ke Deir al-Zor, di mana SDF masih berjuang melawan IS. Para pemimpin Kurdi mengatakan tujuan mereka adalah otonomi daerah di dalam wilayah Suriah yang terdesentralisasi, bukan kemerdekaan. (Perry, 2018)

Hubungan Kurdi Suriah dan Kurdi Turki terbentuk karena hubungan kekeluargaan, geografis dan sejarah antara kedua kelompok ini. Afiliasi Kurdi Suriah dan Kurdi Turki kemudian terwakili oleh afiliasi dua partai Kurdi di masing-masing negara tersebut, PYD (Democratic Union Party) dan PKK (Kurdistan Worker's Party). PYD sejatinya dibentuk karena terinspirasi dari pemikiran pemimpin PKK, Abdullah Ocalan, untuk membangkitkan nasionalisme Kurdi. Tujuan perjuangan PYD pun sebagian besar berakar dari ideologi PKK.

Hubungan PYD dan PKK semakin menguat pada tahun 1984-1999 ketika Damaskus mendukung hubungan PYD dan PKK untuk melemahkan pemerintahan Turki. Dengan demikian, sesungguhnya PYD memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Suriah. Dalam perkembangan terakhir, hubungan PYD dan PKK kembali menguat menyusul terjadinya krisis Suriah sejak tahun 2012. PYD selama ini menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Suriah, dan rezim Bashar Al-Assad berharap PYD berpihak pada kubu pemerintah (Pada bulan November 2012, Bashar Al-Assad menyatakan bahwa PYD adalah warga negara patriotik yang membela negara, setelah sebelumnya sayap militer PYD yaitu YPG, melawan pasukan oposisi Suriah di daerah Hatay, Turki. Namun demikian, dukungan pemerintah Suriah terhadap PYD dimanfaatkan oleh PKK untuk mengamankan kepentingannya di Suriah, yaitu menjadikan provinsi Kurdi di Suriah sebagai wilayah untuk menyerang wilayah Turki.

Hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi Turki, terlebih sikap PYD yang sejauh ini terlihat berpihak kepada rezim Bashar Al Assad dan enggan bersatu dengan pemerintah Turki untuk melawan rezim Assad. Dukungan PYD terhadap PKK pun terlihat selama bulan Agustus 2012, ketika PYD melakukan demonstrasi sebagai bentuk peringatan serangan militer Turki terhadap provinsi suku Kurdi Turki di tahun 1984 (Caves, 2012).

Turki menganggap kelompok PKK dan PYD adalah organisasi teroris yang berpotensi mengancam keamanan dalam negeri Turki. Lebih lanjut pemberontakan Kurdi di wilayah Turki yang merupakan isu keamanan dalam Negeri Turki yang tidak bisa dianggap remeh, karena pemberontak Kurdi menginginkan untuk merdeka dari Turki, dan yang dikawatirkan Turki adalah pemberontak Kurdi ini semakin lama akan bertambah kuat, tentunya bertambahnya kekuatan kurdi ini tak akan berjalan jika tidak ada dukungan dari pihak lain, Suriah merupakan salah satu Negara yang memanfaatkan Etnis Kurdi untuk mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri Turki dengan memberikan dukungan terhadap pemberontak ini. Oleh sebab itu Turki melakukan self defense dengan cara melakukan intervensi militer ke Suriah untuk meredam dan menghapus akar-akar terorisme yang berpotensi untuk bertumbuh sehingga akan sulit untuk diatasi nantinya.

Turki melakukan beberapa operasi yang bertujuan untuk mengambil wilayah yang dikuasai oleh kelompok militan suku Kurdi. Operasi Eufrat Shield (Perisai Efrat) dilakukan pada bulan Agustus 2016 untuk merebut wilayah Jarablus, al-Rai, Dabiq dan al-Bab yang dikuasai oleh DAESH dan YPG, sayap militer dari PYD. Dalam operasi Eufrat Shield ini militer Turki membantu FSA (Free Syrian Army) yang merupakan kelompok oposisi pemerintah Suriah dengan artileri, tank, kekuatan udara dan pasukan khusus dalam mengambil alih Jarabulus dan Manbij yang terletak di sebelah barat sungai Eufrat dan sekitar satu kilometer (mil) di selatan perbatasan Turki. The Independent, menyebut 1.000 pasukan khusus Turki terlibat dalam operasi ini.

Kemudian Pada bulan Januari tahun 2018 Turki melakukan Olive Branch Operation (operasi Cabang Zaitun) dengan daerah tujuannya adalah kota Afrin, Aleppo, Suriah. Afrin telah menjadi tempat persembunyian utama bagi PYD / PKK sejak Juli 2012 ketika rezim Assad di Suriah meninggalkan kota ke kelompok teror tanpa melakukan perlawanan. Dalam operasi ini Turki melalui Angkatan Udaranya mampu meluncurkan operasi besar

dengan melibatkan sedikitnya 72 pesawat di hari pertama. Bahkan, Turki mengerahkan pesawat pengisi bahan bakar udara dan pesawat tanpa awak yang memiliki amunisi rudal cirit. Pihak Keamanan Turki merangkul 9 tujuan "Operasi Cabang Zaitun/Olive Branch Operation" militer Turki melawan organisasi teroris PYD / PKK di Afrin:

1. Untuk membubarkan pemerintahan PKK-YPG yang merupakan kekuatan anti-demokrasi dan menindas masyarakat lokal di wilayah Afrin, Suriah.
2. Menyelamatkan Afrin dari tekanan teroris.
3. Meletakkan dasar pemerintahan yang demokratis, agar orang-orang Afrin mampu mengatur diri mereka sendiri secara demokratis.
4. Pengalaman Turki dalam menciptakan keamanan di Jarabulus, Azaz dan al-Bab dengan operasi militer yang disebut "*Operation Euphrates Shield*" di Suriah, telah mengilhami operasi yang dilakukan di Afrin.
5. Membangun kembali infrastruktur sosial dan ekonomi.
6. Setelah menghilangkan tekanan teroris di Afrin, operasi ini bertujuan untuk menormalkan kembali kehidupan di Manbij.
7. Warga lokal Afrin mendukung operasi tersebut.
8. Manbij memiliki harapan yang sama dengan salah satu suku yang terletak dengan Turki. Setelah Afrin, Manbij juga akan diselamatkan dari tekanan teror dan akan dibangun proyek infrastruktur demi terciptanya pemerintahan yang demokratis.
9. Tidak hanya untuk menghilangkan jejak organisasi teroris PKK di perbatasan Turki, tetapi juga pada saat yang sama bertujuan untuk menormalkan kembali kehidup di Afrin dan Manbij yang berada dibawah tekanan organisasi teroris, serta membangun infrastruktur yang diperlukan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan menganalisa intervensi militer yang dilakukan oleh Turki melalui 2 (dua) operasi militer, yaitu Operasi Euftrat Shield (Perisai Efrat) dan Olive Branch Operation (operasi Cabang Zaitun) untuk menghadapi kelompok suku Kurdi yaitu PKK dan PYD.

## 1.2 Rumusan Masalah

Turki menganggap PKK adalah teroris yang harus dibasmi karna mengancam kedaulatan Negara Turki. Pada saat yang sama PKK dan PYD Suriah memiliki hubungan yang sangat dekat. Maka dari itu, rumusan masalah yang penelitian ini adalah :**“Bagaimana Intervensi Militer Turki dalam Mengatasi Kelompok Militan Kurdi (PKK/PYD) Terkait Konflik Suriah periode 2016-2018?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui asal mula konflik yang terjadi antara Turki dan suku kurdi
2. Mengetahui alasan penetapan PKK / PYD sebagai organisasi teroris
3. Menganalisa intervensi militer yang dilakukan oleh Turki terkait adanya kelompok militan suku Kurdi (PKK/PYD) yang ditetapkan sebagai organisasi teroris dalam konflik Suriah

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. **Manfaat Praktis** dari penelitian ini ialah diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada masyarakat dan menambah informasi bagi penulis maupun pembaca yang ingin lebih dalam melihat dan mengamati perkembangan krisis Suriah terutama mengenai intervensi militer Turki Suriah dalam menangani kelompok militan suku kurdi terkait konflik di Suriah.
2. **Manfaat Akademis** hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan wawasan dalam kajian studi Internasional dalam menganalisis studi kasus dengan menggunakan Teori yang telah dipelajari sebelumnya.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Alur pemikiran dan Asumsi.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan jadwal penelitian.

### **BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran konflik yang terjadi di Suriah, dan menjelaskan pola hubungan Turki dengan kelompok militan suku Kurdi, serta menganalisa bagaimana intervensi militer Turki di dalam konflik tersebut terkait adanya gerakan suku Kurdi yang mendukung pemerintahan Bashar al Assad

### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bagian terakhir penelitian ini akan berisi kesimpulan dan saran. Adapun simpulan dan saran ini untuk merangkum dari bab-bab sebelumnya.

